



Pesepeda Dilarang Berhenti di Malioboro

SETELAH ribuan pesepeda memadati jantung Kota Yogyakarta pada akhir pekan kemarin, berbagai kebijakan pun diambil agar kondisi serupa tak kembali terulang. Salah satunya dengan tidak mengizinkan para pesepeda berhenti di titik-titik tertentu,

misal Tugu Pal Putih, Malioboro, Titik Nol, dan Alun-Alun Utara.

"Silakan bersepeda, tapi tidak boleh kumpul. Tidak boleh berhenti. Malioboro tidak boleh untuk selfie dan

● ke halaman 11

Pesepeda Dilarang Berhenti

● Sambungan Hal 1

kongko termasuk Titik Nol dan Tugu. Silakan mereka bersepeda (lalu) pergi. Nanti dibarkan (kalau berhenti dan berkumpul), semua anggota TNI/Polri difokuskan di sana," tegas Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, di Kematihan, Senin (8/6).

Dia menjelaskan ia bersama tim gabungan menambah jumlah personel yang berjaga di kawasan Malioboro. Kondisi biasa, ia mengatakan ada dua regu yang berjaga, masing-masing di Titik Nol Kilometer dan di Malioboro.

"Mulai hari ini (Senin), pukul 10.00 sudah ditempatkan 4 regu sepanjang Malioboro dan 2 regu di Alun-Alun Utara. Kemudian mulai Sabtu-Minggu besok seluruh personel gabungan mulai pukul 06.00 saya tempatkan di sepanjang Tugu sampai Alun-Alun Utara. Termasuk malam Minggu personel fokus di sini semua," ungkapnya.

Noviar menambahkan, telah melakukan koordinasi dengan Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta untuk fokus menurunkan personel di wilayah tersebut, termasuk juga berkomunikasi dengan Kepala UPT Malioboro. "Sudah saya hubungi tadi untuk ikut mengarahkan Jogoboro membubarkan kerumunan pesepeda di Malioboro dan sekitarnya," ungkapnya.

New normal?

Maraknya kerumunan dibarengi dengan abai terhadap protokol kesehatan membuat pemberlakuan *new normal* (kenormalan baru) di DIY terancam mundur. Pemda DIY telah merancang berbagai persiapan menuju kenormalan baru setelah status tanggap darurat berakhir pada 30 Juni mendatang, didukung dengan kasus Covid-19 yang mulai melandai. Namun kini semuanya harus kembali dipertimbangkan.

"Saya mendapat banyak in-

Nilai Berita

Sifat

formasi bahwa satu dua hari kemarin banyak kerumunan. Ada yang di depan pasar Malioboro, Tugu, dan Titik Nol. Ini perlu jadi perhatian masyarakat. Kita tidak boleh (terlena) dengan rencana pemerintah pusat ada *new normal*, DIY masih tanggap darurat. Tanggap darurat masih ada larangan orang berkerumun, protokol kesehatan wajib dilakukan," ungkap Sekda DIY "Kadamanta Baskara Aji, di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Ia menjelaskan, dalam situasi tersebut masih banyak warga yang tidak mau menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. "Kalau terjadi penularan, *angel banget* tracing siapa yang tanggal segini *dolan ning* Malioboro," ucapnya.

Aji paham bahwa masyarakat mulai leth diminta untuk tetap diam di rumah. Tapi tindakan yang dilakukan dengan bersepeda lantas menciptakan kerumunan, tidak bisa dibenarkan. "Kita ingin membuka pelan-pelan, tapi bukan seperti itu. Kita buka ekonominya, kuliner dulu agar jalan dengan baik. Kalau tetap mau sepedaan, ya, jangan berhenti lalu berkerumun," tegasnya.

Mantan Kepala Disdikpora DIY ini menambahkan, bila masyarakat masih tidak mematuhi imbauan pemerintah, maka otomatis kenormalan baru tidak dapat diterapkan dalam waktu dekat. "Seperti ini bisa mundur. Kalau dulu jalan macet tapi mereka enggak turun. Sekarang sudah pada berhenti (berkerumun). Jagongan dicopot maskernya. Kalau sampai ada kejadian masyarakat enggak disiplin, enggak usah nunggu kasus. Untuk mengambil kebijakan enggak usah nunggu kasus," tegasnya.

Geram

Sementara itu aktivis Warga Berdaya, Elanto Wijoyono, meski sangat hobi dan gemar bersepeda, ia geram dengan banyaknya sepeda yang membanjiri berbagai kawasan di Yogya di tengah ancaman penularan virus corona. Masalahnya, menurut dia, mereka hadir hanya untuk berswafoto dan bersenang-senang dengan sepedanya. "Jarang dari mereka yang mematuhi protokol kesehatan. Itu sama saja kurang tepat. Untuk itu, Pemda DIY harus tegas dalam membuat peraturan. Karena pandemi Covid-19 ini belum mereda," katanya.

Namun, ia juga menyoroti Pemda DIY dalam penanganan Covid-19 selama ini. Menurutnya, Pemda DIY tidak memiliki arah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Misalnya, lanjut Elanto, sejauh ini banyak pendatang yang masuk ke DIY tanpa adanya protokol yang ketat, baik itu di perbatasan maupun di level desa.

Kedua, arah status tanggap darurat yang tidak memiliki payung hukum yang jelas mengakibatkan penegak hukum kesulitan menindak para pelanggar. "Saya terus terang kashihan dengan Satpol PP mereka bekerja tidak bisa bertindak apa-apa, hanya sporadis saja dalam menertibkan masyarakat. Karena payung hukumnya tidak jelas," terang dia.

Elanto pun memberikan saran, akses keluar masuk DIY harus lebih diperhatikan. Ia berharap, Pemda DIY harus mulai berpikir untuk lebih melindungi warga. Menurutnya, warga akan terlena dan mulai melampiaskan kebosanan selama berbulan-bulan berdiam diri di rumah.

"Sebaiknya hal itu dipertegas melalui aturan. Untuk mobilitas para pekerja okelah, tidak masalah. Kalau mereka keluar hanya untuk berfoto dan bersenang-senang sebaiknya jangan dulu, kita semua masih di tengah pandemi," imbuhnya.

Elanto berharap penegakan hukum di ruang publik harus jelas. Menurutnya, sudah saatnya Satpol PP benar-benar menggunakan kewenangannya dalam menindak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, ia juga menegaskan supaya Pemda DIY merumuskan lebih detail terkait poin-poin status tanggap darurat di DIY, khususnya untuk ruang publik. (kur/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. UPT. Malioboro 3. BPBD 4. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005